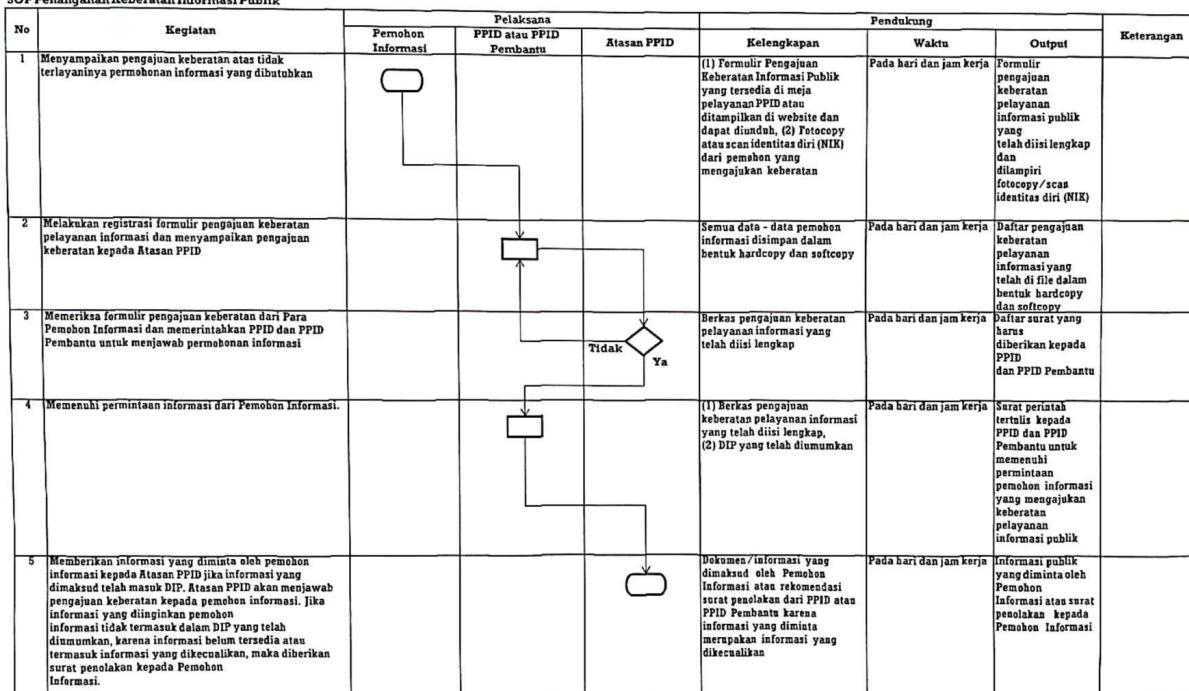


 <p>PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</p>	<table border="1" style="width: 100px; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Nomor Urut SOP</td><td>78</td></tr> <tr><td>Tanggal Perbaikan</td><td>4 Juni 2021</td></tr> <tr><td>Tanggal Berlaku</td><td>4 Juni 2021</td></tr> <tr><td>Tanggal Efektif</td><td>4 Juni 2021</td></tr> <tr><td colspan="2">Disahkan Oleh</td></tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">  DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT Surat Edaran Nomor 78, Tahun 2021 Tujuan: Mengatur Penanganan Keberatan Informasi Publik Tanda Tangan: [Signature] </td></tr> <tr><td>Nama SOP</td><td>Penanganan Keberatan Informasi Publik</td></tr> </table>	Nomor Urut SOP	78	Tanggal Perbaikan	4 Juni 2021	Tanggal Berlaku	4 Juni 2021	Tanggal Efektif	4 Juni 2021	Disahkan Oleh		 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT Surat Edaran Nomor 78, Tahun 2021 Tujuan: Mengatur Penanganan Keberatan Informasi Publik Tanda Tangan: [Signature]		Nama SOP	Penanganan Keberatan Informasi Publik
Nomor Urut SOP	78														
Tanggal Perbaikan	4 Juni 2021														
Tanggal Berlaku	4 Juni 2021														
Tanggal Efektif	4 Juni 2021														
Disahkan Oleh															
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT Surat Edaran Nomor 78, Tahun 2021 Tujuan: Mengatur Penanganan Keberatan Informasi Publik Tanda Tangan: [Signature]															
Nama SOP	Penanganan Keberatan Informasi Publik														
<p>Batasan</p> <p>1 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3 Undang-Undang No. 22 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dasar Pemerintahan Daerah 6 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 8 Tahun 2010 tentang Penyelegaraan Urusan Pemerintahan Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika 7 Peraturan Kementerian Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 8 Peraturan Kementerian Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 9 Peraturan Kementerian Informasi No. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik 10 Keputusan Gubernur Kalbar No. 7/DISKOMINFO/2020 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat</p>															
<p>Kualifikasi Pelaksana</p> <p>1 Minimal SMA / Sederajat 2 Mengusai Komputer dan Tata Pembuktian 3 Memiliki pengetahuan mumpuni Pelayanan Prima 4 Memiliki Tata Krama</p>															
<p>Keterkaitan</p> <p>Peralatan /Perlengkapan</p> <p>1 Lembaran Kerja & Bencana Kerja 2 Term Of Reference 3 Alat Tulis Kantor 4 Jaringan Internet</p>															
<p>Peringatan</p> <p>1 Bila prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik 2 Bila prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai 3 Bila prosedur ini tidak berjalan maka image positif PPID Pemerintah Prov. Kalbar terhadap pesermasama tama menjadi negatif</p> <p>Panduan Dan Pendekatan</p> <p>- Dimungkap dalam bentuk softcopy dan hardcopy</p>															

 Dipindai dengan CamScanner

SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik



 Dipindai dengan CamScanner